

PENGUATAN EKONOMI PANCASILA

Oleh: Prof ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
Guru Besar Manajemen
NUP: 9903252922
Oktober, 2024

Menurut INDONESIA REVIEW.ID (01/10/2024)-Trend – Analyses – Research, terdapat ketimpangan ekonomi di Indonesia, di mana 10% orang terkaya menguasai 60% aset nasional sementara 50% terbawah hanya memiliki 4,5%, mencerminkan masalah yang serius dalam distribusi kekayaan. Fenomena ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan menunjukkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas negara.

1. Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini antara lain:

a. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Merata

Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama beberapa dekade, distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut tidak merata. Sebagian besar keuntungan dari pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir elite atau orang-orang yang sudah memiliki modal besar. Mereka memiliki akses lebih baik ke sumber daya seperti tanah, modal, dan jaringan bisnis.

b. Akses Terbatas ke Pendidikan dan Pelatihan

Akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali terbatas bagi masyarakat yang berada di lapisan ekonomi bawah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan keterampilan yang signifikan, yang pada gilirannya mempersempit kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Pendidikan berkualitas cenderung lebih mudah diakses oleh golongan ekonomi atas, yang meningkatkan kesempatan mereka untuk mempertahankan dan memperluas kekayaan.

c. Struktur Pajak dan Redistribusi Pendapatan

Sistem perpajakan di Indonesia masih dianggap belum cukup progresif untuk mengatasi ketimpangan. Pajak progresif yang lebih tinggi bagi golongan kaya, serta kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih baik melalui program jaminan sosial, masih belum maksimal. Banyak orang kaya yang juga menghindari pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau bahkan melakukan penghindaran pajak secara ilegal.

d. Konsentrasi Kekayaan di Sektor Tertentu

Sektor-sektor ekonomi yang sangat menguntungkan, seperti properti, sumber daya alam (minyak, gas, dan tambang), serta sektor perbankan, sering kali didominasi oleh keluarga-keluarga atau kelompok bisnis tertentu. Hal ini menciptakan oligopoli di mana kekayaan dan kendali ekonomi berada di tangan segelintir pihak, sementara akses ke sektor-sektor ini sangat terbatas bagi masyarakat umum.

e. Kesenjangan Geografis

Ketimpangan ekonomi juga tercermin dalam kesenjangan antarwilayah. Wilayah-wilayah seperti Jawa, terutama Jakarta, mendapatkan investasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah terpencil seperti Papua atau Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, pendapatan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut jauh lebih rendah, yang memperparah ketimpangan ekonomi secara nasional.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang serius, antara lain:

a. Kemiskinan Struktural

Ketimpangan yang tajam mempersulit mobilitas sosial, sehingga banyak orang miskin terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit dipatahkan. Kurangnya akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja memperkuat ketidaksetaraan antar generasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung tetap miskin saat dewasa.

b. Tingkat Kriminalitas dan Ketidakstabilan Sosial

Ketimpangan ekonomi sering kali dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kriminalitas, terutama dalam bentuk pencurian dan kekerasan.

Ketidakpuasan sosial juga bisa memicu protes atau kerusuhan, yang mengancam stabilitas sosial dan politik. Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat bawah terhadap kelompok yang lebih kaya bisa memperuncing ketegangan sosial.

c. Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

Ketika hanya segelintir orang yang memiliki sebagian besar kekayaan, daya beli masyarakat luas terbatas. Ini dapat menghambat konsumsi domestik, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakmampuan golongan bawah untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan diri mengurangi produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya menghambat inovasi dan perkembangan ekonomi jangka panjang.

d. Diskriminasi dan Ketidakadilan Sosial

Dalam banyak kasus, ketimpangan ekonomi juga mengarah pada diskriminasi terhadap golongan ekonomi rendah, baik dalam hal akses ke pekerjaan, layanan publik, maupun hak-hak dasar. Orang-orang yang kaya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan, yang sering kali tidak berpihak pada kepentingan golongan bawah. Hal ini dapat menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus.

3. Upaya Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

a. Reformasi Sistem Perpajakan

Meningkatkan progresivitas pajak, terutama bagi golongan atas, dan memastikan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penghindaran

pajak dapat membantu mengurangi ketimpangan. Hasil dari peningkatan pajak ini dapat digunakan untuk program sosial dan subsidi yang mendukung golongan ekonomi rendah.

b. Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan

Akses yang lebih merata terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan mobilitas sosial. Dengan meningkatkan keterampilan dan kesehatan masyarakat yang berada di golongan bawah, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan standar hidup.

c. Penguatan Program Sosial dan Perlindungan Sosial

Program-program seperti bantuan langsung tunai, jaminan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat perlu diperluas untuk mencakup lebih banyak golongan ekonomi bawah. Program ini harus dirancang agar lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

d. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah perlu mendorong pembangunan yang lebih merata antarwilayah. Dengan memperkuat infrastruktur di daerah-daerah terpencil, akses ke pasar, pendidikan, dan pekerjaan akan lebih mudah dijangkau, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan regional.

e. Mendorong Partisipasi Ekonomi yang Lebih Inklusif

Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan di kalangan masyarakat menengah-bawah dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata.

4. Ancaman bagi Stabilitas

Ketimpangan ekonomi yang ekstrem seperti yang terjadi di Indonesia bukan hanya menjadi masalah moral, tetapi juga ancaman bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mengatasi masalah ini membutuhkan kombinasi antara reformasi kebijakan yang tepat, pembangunan yang merata, dan program-program sosial yang efektif. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa memperuncing konflik sosial dan menghambat potensi ekonomi Indonesia di masa depan.

5. Tantangan dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi

Meskipun upaya mengatasi ketimpangan ekonomi penting untuk dilakukan, realisasinya bukan tanpa tantangan. Ada berbagai hambatan struktural, institusional, dan politik yang membuat proses pengurangan ketimpangan menjadi sulit.

a. Oligarki dan Pengaruh Ekonomi dalam Politik

Indonesia menghadapi tantangan dari kekuatan oligarki, di mana sekelompok kecil orang kaya memiliki pengaruh besar dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Oligarki ini sering kali memiliki akses langsung terhadap pengambil keputusan, baik melalui sumbangan politik, jaringan bisnis, maupun posisi dalam pemerintahan. Hal ini menciptakan situasi di mana kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan kelompok ekonomi atas, memperkuat kekayaan mereka, dan memperparah ketimpangan.

b. Korupsi dan Penegakan Hukum yang Lemah

Korupsi di berbagai tingkat pemerintahan juga menjadi hambatan utama dalam upaya redistribusi kekayaan yang adil. Program-program sosial yang seharusnya membantu golongan bawah sering kali tidak efektif karena dana yang dialokasikan bocor atau tidak sampai kepada yang berhak. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap penghindaran pajak dan praktik-praktik bisnis yang tidak etis turut memperbesar ketimpangan, karena pihak-pihak kaya dapat melarikan kekayaannya tanpa terkena sanksi yang memadai.

c. Resistensi terhadap Reformasi Pajak

Reformasi perpajakan yang lebih progresif, seperti pajak kekayaan yang lebih tinggi bagi golongan atas, sering kali menghadapi resistensi politik dan sosial. Kelompok-kelompok kaya dan berpengaruh biasanya melakukan lobi untuk menentang kebijakan yang dianggap mengurangi keuntungan mereka. Selain itu, ada pandangan konservatif yang menganggap pajak tinggi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun studi menunjukkan bahwa distribusi kekayaan yang lebih merata justru dapat mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

d. Ketidakmerataan Akses Teknologi

Dalam era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0, teknologi memainkan peran besar dalam menciptakan kekayaan baru. Namun, akses terhadap teknologi canggih masih tidak merata, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Teknologi ini sering kali hanya diakses oleh masyarakat perkotaan atau yang memiliki modal besar, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi. Digital divide atau kesenjangan digital ini semakin memperkuat ketimpangan, karena kelompok yang tidak memiliki akses teknologi tidak dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang sama.

e. Globalisasi dan Dampak Ekonomi Dunia

Globalisasi telah membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga memperburuk ketimpangan, terutama karena manfaat dari perdagangan internasional, investasi asing, dan teknologi sering kali dinikmati oleh segelintir kelompok. Masyarakat yang kurang terhubung dengan jaringan global sering kali tertinggal dan tidak mampu bersaing, baik dalam hal keterampilan maupun modal.

6. Peran Kebijakan Publik dalam Mengurangi Ketimpangan

Kebijakan publik yang efektif dapat memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, kebijakan tersebut harus dirancang dengan baik, diimplementasikan secara efektif, dan didukung oleh berbagai pihak. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diambil:

a. Kebijakan Fiskal yang Lebih Progresif

Pemerintah harus lebih fokus pada kebijakan fiskal yang mampu mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Pajak progresif, yang memberlakukan tarif pajak lebih tinggi pada individu atau perusahaan dengan pendapatan tinggi, dapat menjadi salah satu solusi. Dana yang dikumpulkan dari pajak ini dapat digunakan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, khususnya di daerah-daerah tertinggal.

b. Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasional

Untuk mendorong mobilitas sosial, pemerintah perlu berinvestasi lebih besar dalam pendidikan, terutama pendidikan yang terkait dengan keterampilan vokasional yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Pelatihan teknis dan keterampilan digital juga penting untuk

mempersiapkan masyarakat menghadapi transformasi ekonomi yang semakin berbasis teknologi.

c. Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif

Pembangunan infrastruktur harus mencakup wilayah-wilayah yang tertinggal, bukan hanya terfokus pada daerah perkotaan atau pusat-pusat bisnis. Dengan membangun infrastruktur di daerah pedesaan, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pasar, pendidikan, dan pekerjaan. Ini juga dapat menarik investasi ke daerah-daerah tersebut, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

d. Kebijakan untuk Mendorong UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai lapisan. Kebijakan yang mendukung UMKM, seperti kemudahan akses permodalan, pelatihan manajemen, dan insentif pajak, dapat membantu mempercepat pemerataan ekonomi. Selain itu, digitalisasi UMKM melalui platform e-commerce dan teknologi finansial (fintech) dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing.

e. Program Perlindungan Sosial yang Lebih Kuat

Program perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, bantuan pangan, dan subsidi bagi masyarakat miskin harus diperkuat dan diperluas cakupannya. Program-program ini bertujuan untuk memberikan jaring pengaman bagi masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti PHK massal atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

7. Peran Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil

Selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil juga harus berperan aktif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia perlu melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih substantif dan berkelanjutan. CSR yang efektif tidak hanya sekadar donasi, tetapi melibatkan upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

b. Kemitraan Publik-Swasta

Kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi ketimpangan. Contohnya, swasta dapat terlibat dalam proyek-proyek pembangunan daerah tertinggal atau mendukung program pelatihan vokasional yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

c. Peran Masyarakat Sipil

Organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas, dan akademisi juga memiliki peran penting dalam memerangi ketimpangan. Mereka dapat bertindak sebagai pengawas kebijakan pemerintah, mendorong reformasi, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang membutuhkan.

8. Perlu Pendekatan yang Komprehensif

Mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, pembangunan yang merata, dan akses yang adil terhadap sumber daya menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan ini. Ketimpangan ekonomi yang tinggi bukan hanya mengancam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan adalah prioritas yang harus terus diupayakan demi terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.

9. Reformasi Struktural untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia tidak hanya membutuhkan kebijakan yang berorientasi jangka pendek, tetapi juga reformasi struktural yang berkelanjutan. Reformasi ini melibatkan perbaikan institusi, penegakan hukum, serta perubahan paradigma pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

a. Reformasi Agraria

Salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah ketimpangan kepemilikan lahan. Masyarakat miskin di pedesaan sering kali tidak memiliki akses terhadap lahan, atau lahan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga produktivitas mereka rendah. Sementara itu, sebagian besar lahan dikuasai oleh perusahaan besar atau individu kaya. Reformasi

agraria yang menyeluruh, termasuk redistribusi lahan kepada petani kecil dan peningkatan akses mereka terhadap teknologi dan modal, dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di pedesaan.

Program reformasi agraria yang efektif juga harus mencakup peningkatan hak-hak kepemilikan tanah, sehingga petani kecil dapat merasa lebih aman dalam berinvestasi dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, pemberian dukungan teknis dan infrastruktur pertanian akan membantu meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

b. Penegakan Hukum yang Lebih Adil

Ketimpangan ekonomi juga terkait erat dengan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Akses terhadap sistem peradilan yang adil dan efektif sering kali lebih mudah bagi golongan kaya, sementara golongan miskin sering kali terpinggirkan. Reformasi hukum yang fokus pada kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat adalah langkah penting dalam mengatasi ketimpangan.

Penegakan hukum yang kuat terhadap praktik-praktik korupsi, penghindaran pajak, dan monopoli ekonomi juga harus menjadi prioritas. Dengan demikian, sumber daya dan keuntungan ekonomi dapat lebih adil didistribusikan, dan kesempatan ekonomi yang setara dapat tercipta bagi semua kalangan.

c. Desentralisasi Ekonomi

Desentralisasi ekonomi adalah langkah penting dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Saat ini, sebagian besar kegiatan ekonomi dan investasi terkonsentrasi di Jakarta dan wilayah Jawa lainnya, sementara daerah-daerah di luar Jawa masih tertinggal. Melalui desentralisasi, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah lain dengan memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, pajak, dan investasi.

Desentralisasi ekonomi harus disertai dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah, baik dalam hal pengelolaan keuangan, kebijakan pembangunan, maupun tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk berinovasi dalam menciptakan peluang ekonomi lokal yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pusat.

d. Reformasi Ketenagakerjaan

Kesenjangan antara upah pekerja dan keuntungan perusahaan juga menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan ekonomi. Untuk mengurangi ketimpangan ini, diperlukan reformasi ketenagakerjaan yang adil, termasuk penetapan upah minimum yang layak, perlindungan tenaga kerja informal, serta pengawasan ketat terhadap hak-hak pekerja.

Selain itu, program pelatihan keterampilan dan pendidikan ulang bagi pekerja juga sangat penting dalam menghadapi perubahan ekonomi global, seperti otomatisasi dan digitalisasi. Pekerja yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri modern akan lebih mampu meningkatkan pendapatan mereka dan mempersempit kesenjangan ekonomi.

e. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi

Partisipasi perempuan dalam ekonomi sering kali terhambat oleh norma sosial, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan diskriminasi di tempat kerja. Mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia juga harus melibatkan peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam sektor formal.

Program-program yang mendukung perempuan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan tinggi, pelatihan keterampilan, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja sangat penting. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan melalui akses terhadap modal dan pasar dapat membantu menciptakan peluang ekonomi baru dan mengurangi ketimpangan gender dalam distribusi kekayaan.

10. Transformasi Ekonomi untuk Masa Depan yang Lebih Inklusif

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Beberapa inisiatif yang dapat diambil untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil di masa depan antara lain:

a. Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau

Transformasi menuju ekonomi hijau atau pembangunan berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan sekaligus melindungi lingkungan. Ekonomi hijau menciptakan peluang pekerjaan baru, terutama di sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan

teknologi ramah lingkungan. Investasi dalam sektor-sektor ini dapat membuka akses bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, kebijakan pembangunan yang berfokus pada kelestarian lingkungan akan membantu masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti petani kecil atau masyarakat pesisir. Ketahanan ekonomi yang dibangun melalui pendekatan lingkungan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dan mengurangi ketimpangan.

b. Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan dan bisnis. Inklusi keuangan, yaitu keterlibatan semua kelompok dalam sistem keuangan, merupakan langkah penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Akses yang lebih mudah terhadap perbankan, layanan keuangan digital, dan pinjaman mikro dapat membantu masyarakat miskin memulai usaha, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari kemiskinan.

Selain itu, ekonomi digital membuka kesempatan baru bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas pasar mereka melalui e-commerce dan platform online. Dengan dukungan teknologi, UMKM dapat bersaing di pasar global dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih merata.

c. Inovasi dalam Pendidikan

Inovasi dalam pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan menciptakan mobilitas sosial. Pendidikan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan industri, seperti pendidikan berbasis teknologi dan STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika), dapat membantu masyarakat dari berbagai lapisan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan di pasar kerja modern.

Selain itu, model pendidikan yang lebih inklusif, seperti pendidikan jarak jauh (online), dapat memberikan akses kepada masyarakat di daerah terpencil atau yang tidak mampu mengikuti pendidikan formal secara penuh waktu. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

11. Kesimpulan: Membangun Ekonomi yang Lebih Adil dan Inklusif

Mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia memerlukan pendekatan multi-sektor dan kolaboratif, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kebijakan yang difokuskan pada redistribusi kekayaan, akses yang lebih merata terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang inklusif, harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional.

Di masa depan, Indonesia harus berupaya untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, negara tidak hanya akan mencapai kemakmuran yang lebih merata, tetapi juga membangun stabilitas sosial dan politik yang lebih kuat.

Ketimpangan ekonomi yang tinggi adalah tantangan besar, tetapi dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia memiliki potensi untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif bagi semua.

Ringkasan

Ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat tajam, di mana 10% orang terkaya menguasai 60% aset nasional, sementara 50% masyarakat terbawah hanya menguasai 4,5%. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, akses terbatas pada pendidikan, sistem pajak yang belum progresif, dan konsentrasi kekayaan di sektor-sektor tertentu.

Ketimpangan ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kemiskinan struktural, ketidakstabilan sosial, dan penghambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan reformasi dalam beberapa bidang, antara lain reformasi perpajakan, peningkatan akses pendidikan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan dukungan terhadap UMKM.

Selain itu, diperlukan reformasi struktural, termasuk reformasi agraria, desentralisasi ekonomi, penegakan hukum yang lebih adil, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi. Transformasi ekonomi menuju

pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, serta inklusi keuangan melalui digitalisasi, juga merupakan langkah penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

Kesimpulannya, mengurangi ketimpangan ekonomi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, serta kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di masa depan.

Daftar Pustaka

1. **Piketty, T.** (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press.
 - o Buku ini memberikan analisis mendalam mengenai distribusi kekayaan global dan ketimpangan ekonomi, yang relevan dengan situasi di Indonesia.
2. **Stiglitz, J. E.** (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton & Company.
 - o Stiglitz membahas bagaimana ketimpangan ekonomi berdampak negatif pada stabilitas sosial dan politik, serta langkah-langkah untuk mengatasinya.
3. **Badan Pusat Statistik (BPS).** (2021). *Laporan Indeks Ketimpangan Indonesia*. Jakarta: BPS.
 - o Laporan resmi dari BPS ini memberikan data dan analisis mengenai distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia.
4. **World Bank.** (2020). *Indonesia Economic Prospects: Strengthening Competitiveness and Reducing Inequality*. Washington, DC: World Bank.
 - o Laporan ini membahas tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan daya saing global.
5. **Oxfam Indonesia.** (2017). *Towards a More Equal Indonesia: How to Reverse the Growing Gap Between the Rich and the Rest*. Jakarta: Oxfam Indonesia.

- Laporan ini fokus pada analisis ketimpangan ekonomi di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasinya.
6. **Todaro, M. P., & Smith, S. C.** (2020). *Economic Development* (13th ed.). London: Pearson.
 - Buku ini memberikan kerangka teori dan praktik dalam pembangunan ekonomi, termasuk analisis ketimpangan dan distribusi pendapatan.
 7. **Nugroho, R., & Wulandari, D.** (2021). *Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Tantangan dan Solusi Kebijakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
 - Buku ini secara khusus membahas fenomena ketimpangan ekonomi di Indonesia serta menawarkan pendekatan kebijakan yang relevan.
 8. **International Labour Organization (ILO).** (2019). *Indonesia Employment Outlook: Reducing Inequality through Decent Work*. Geneva: ILO.
 - Laporan ini mengulas hubungan antara ketimpangan ekonomi dan pasar tenaga kerja di Indonesia, serta pentingnya pekerjaan layak dalam mengatasi ketimpangan.
 9. **Friedman, J., & Levinsohn, J.** (2002). *The Distributional Impacts of Indonesia's Financial Crisis on Household Welfare: A "Rapid Response" Methodology*. *World Bank Economic Review*, 16(3), 397-423.
 - Artikel ini membahas dampak krisis ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia, terutama pada rumah tangga miskin.
 10. **Asian Development Bank (ADB).** (2021). *Key Indicators for Asia and the Pacific 2021: Economic Growth and Inequality in Southeast Asia*. Manila: ADB.
 - Laporan ini memberikan data dan analisis tentang ketimpangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, serta rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan.

11. INDONESIA REVIEW.ID (01/01/2024)-Trend – Analyses – Research, Policy Brief. Penguatan Ekonomi Pancasila.
12. ChatGPT 4o. 8 Oktober 2024. Kopilot Artilel ini.